

**EVALUASI KEBIJAKAN PARKIR SEBAGAI UPAYA PENERTIBAN  
DAN MEMINIMALISIR TINDAKAN PARKIR LIAR  
(Studi Pada Wilayah Kecamatan Lowokwaru Malang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik



**Disusun Oleh:**  
**CLINTON BERLIAN PUTRA HENCI**  
**NIM.2018210196**

**KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK PROGRAM STUDI  
ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU  
POLITIK UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi**

**MALANG**

**2022**

## ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan Walikota Malang No. 4 Tahun 2009 Terkait mengelola lahan Parkir Mengamanatkan Bahwasannya Parkir dilakukan melalui Tujuan, Jenis Kepemilikan dan Pengoprasiannya Serta Penertibannya. Namun perjalanan Kebijakan penertiban parkir di kota Malang Masih banyak Fenomena yang sering dijumpai dalam sistem Transportasi Parkir sebelumnya Terimplementasi dengan baik dikarenakan ada pembatas parkir yang harus dimanfaatkan kadang-kadang ada dan begitupun sebaliknya. Dalam Pengelolaan tempat parkir masih terdapat Petugas Parkir di lapangan yang menata menata kendaraan di pinggir jalan lebih dari sharp/satu baris serta ada persilangan dalam menghentikan papan antara biaya penghentian dan permintaan penghentian. Alasan pemeriksaan ini ialah untuk mengetahui Evaluasi Kebijakan parkir sebagai upaya penertiban dan Meminimalisir Tindakan Parkir Liar. Untuk mendapatkan Sumber data menggunakan wawancara, Observasi. Untuk menentukan Informan memakai *Sowboll Sampling* Dengan Informan Kunci Ketua Bidang parkir Dinas Perhubungan Kota Malang. Sedangkan Keabsahan data memakai Miles, Huberman dan Saldana 2014 yang mana terdapat mengumpulkan data, Kondensasi data, menyajikan data Dan Penarikan Kesimpulan. Dari hasil riset berikut terkait Evaluasi Kebijakan Parkir Sebagai Upaya Penertiban Dan Meminimalisir Tindakan Parkir Liar, Yaitu Dishub kota Malang terus melakukan sosialisasi tentang pemahaman aturan kepada juru parkir untuk dapat mengendalikan ketidak tertiban di lapangan, selain itu dishub juga memberikan Kelengkapan parkir berupa sarana dan prasarana khususnya berbagai perangkat keras, perlengkapan kerja dan berbagai kantor yang mampu sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan tugas penghentian.

**Kata Kunci; Evaluasi, Parkir liar, Juru Parkir, Dishub Kota Malang**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berhenti ialah suatu keanehan yang dalam banyak hal dialami dalam kerangka transportasi perhentian, yang telah menjadi kebutuhan daerah setempat bagi semua kalangan masyarakat. Apalagi di daerah padat penduduk seperti gerai ritel dan tempat wisata seiring dengan perkembangan kendaraan yang sangat tinggi dalam kehidupan masyarakat, kebutuhan akan tempat parkir juga semakin berkembang. Pengembangan kendaraan roda dua dan roda empat sebagai bagian dari kenyataan yang harus dihadapi masyarakat. dengan meningkatnya kendaraan kebutuhan ruang parkir pun makin besar dengan ini keinginan ruang parkir bisa ikutkan dengan makin banyaknya kendaraan lalu terus mengakibatkan kepada parkir di sembarang tempat dan parkir di tempat yang dilarang.

Sebagaimana dalam peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penatausahaan Bengkel Parkir bahwasannya untuk melakukan permintaan, permintaan dan pelipur lara bagi pengguna jalan, dua pejalan kaki dan pengguna kendaraan dan untuk permintaan kota, penyelenggaraan garasi parkir kendaraan di Kota Malang sangatlah penting. Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah dan Negara Bagian Daerah/Kota Untuk Pedoman Perparkiran yang pengendalian ruang parkir diperlukan adanya kebijakan-kebijakan yang dapat mengatur sistem parkir dan penataan serta pembatasan area parkir.

Area parkir secara keseluruhan belum sepenuhnya dilakukan dengan alasan perhentian terjauh yang seharusnya dimanfaatkan kadang-kadang ada dan kadang tidak. penataan kendaraan kiri agar tidak mengganggu arus lalu lintas masih

belum dilakukan mengingat petugas di lapangan masih melakukan pengawasan terhadap kendaraan di pinggir jalan umum yang melebihi satu bentuk/satu jalur terdapat areal parkir yang menutupi jalan tersebut. eksekutif antara meninggalkan biaya dan meninggalkan biaya karena dua pedoman provinsi yang mengarahkan keduanya dan tidak ada seorang pun yang mengontrol meninggalkan dewan sehingga perjuangan tak terlihat muncul di asosiasi perangkat lokal (OPD) yang mengawasi meninggalkan dan perselisihan luar (masyarakat) meskipun tidak adanya pengawasan dan Pengawasan terhadap pendamping cuti yang ada, persoalan cuti di Kota Malang sangat membingungkan terutama ketika kenaikan tarif cuti menyebabkan masalah lain yang lebih membingungkan seperti meliputi pengurusan tugas dan kewajiban cuti, maraknya petugas cuti yang melanggar hukum hingga premanisme untuk bisa mendapat keuntungan dan mempertahankan kekuasaan dengan membentuk aliansi. Dalam hal ni peran penting pemerintah dalam rangka melakukan penertiban dan merumuskan kebijakan dan peraturan guna meminimalisir tindakan parkir liar yang memiliki pengaruh positif untuk publik dengan adanya peraturan kebijakan yang terwakili semua pihak.

Melalui pemaparan terkait problematika maka peneliti mengambil judul **“Evaluasi Kebijakan Parkir Sebagai Upaya Penertiban Dan Meminimalisir Tindakan Parkir Liar”**.

## **1.2 Rumusan masalah**

Perumusan permasalahan riset berikut ialah :

1. Bagaimana Evaluasi Kebijakan Parkir Sebagai Upaya Penertiban Dan Meminimalisir Tindakan Parkir Liar?
2. Apa saja Faktor yang mendukung Dan faktor yang menghambat pada Upaya Penertiban Dan Meminimalisir Tindakan Parkir Liar?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Riset berikut memiliki tujuan yang mana sebagai pengetahuan analisa peran dinas Perhubungan untuk penertiban oknum pelanggar parkir di kecamatan lowokwaru sehingga dapat terkendali dan teratur

1. Untuk Mengetahui Evaluasi Kebijakan Parkir Sebagai Upaya Penertiban Dan Meminimalisir Tindakan Parkir Liar
2. Untuk lebih tahu terkait Faktor yang mendukung Dan faktor yang menghambat pada Upaya Penertiban Dan Meminimalisir Tindakan Parkir Liar.

## **1.4. Manfaat penelitian**

Riset berikut memiliki manfaat yang di khususkan kepada:

1. Manfaat Akademis

Sebagai pembanding atas riset serupa yang membahas terkait evaluasi kebijakan parkir sebagai upaya penertiban dan meminimalisir Tindakan parkir liar wilayah kecamatan lowokwaru.

2. Manfaat Praktis

Untuk sumbangsih konseptual untuk mendapatkan gambaran dan menginformasikan bagi semua pihak terkait dengan kebijakan parkir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James E., 1975, *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Budi Winarno, 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Edisi Revisi) Yogyakarta: Media Pressindo, ISBN -979-222-207-3
- Carollina Bella Viesta, 2019 *Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Parkir Liar* Yogyakarta.
- Dunn, William N., 2013, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gajah Mada University
- Howlett, Michael, and Ramesh, M. (2003). *Studi kebijakan publik: and Policy Subsystems*. Oxford University Press.
- Islamy, M. Irfan. 2015. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Juwita Hartina Br Ginting 2018 *Evaluasi kebijakan penertiban parkir liar*. Medan baru.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya